

## SUMBANGSIH PEMIKIRAN ROBERT BELLAH MENGENAI *CIVIL RELIGION* TERHADAP MODERASI BERAGAMA DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Rolin Ferdilianto Sandelgus Taneo (1), Arly Elizabeth Maria De Haan (2)

Universitas Kristen Artha Wacana (1,2)

E-mail [taneorolin@gmail.com](mailto:taneorolin@gmail.com) (1) [arlydehaan@gmail.com](mailto:arlydehaan@gmail.com) (2)

### Abstrak

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ini sudah lama dikenal sebagai daerah yang tinggi angka toleransinya. Masing-masing umat beragama menerima sesamanya yang berbeda tanpa pandang bulu. Ini adalah suatu prestasi yang harus terus-menerus dipertahankan. Melalui tulisan ini, akan dilihat bagaimana sinergitas umat beragama merawat persatuan dengan memakai teori *Civil Religion*, Bellah pisau bedah. *Civil Religion* yang dikemukakan oleh Bellah selalu relevan untuk dihidupi dalam konteks kemajemukan. Menariknya, *Civil Religion* tidak menjadikan agama sebagai titik pijak tetapi kearifan lokal atau nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan. Hal ini sejalan dengan lahirnya moderasi beragama yang mengedepankan dialog dan penerimaan positif pada sesama yang beragama lain. Untuk bisa mencapai target akhir penulis, maka pendekatan kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan kepustakaan akan menjadi metode yang dipilih dalam tulisan ini. Akhirnya, semoga dengan diselesaikannya tulisan ini, pikiran Bellah bisa dikenal dan terus dihidupi.

**Kata kunci:** *Civil Religion, Moderasi Agama, Nusa Tenggara Timur*

### Abstract

East Nusa Tenggara is one of the provinces in Indonesia. This province has long been known as an area with a high tolerance rate. Each religious community accepts others who are different indiscriminately. This is an achievement that must be continually maintained. Through this paper, it will be seen how the synergy of religious communities maintains unity by using the theory of *Civil Religion*, Bellah the scalpel. *Civil Religion* proposed by Bellah is always relevant to be lived in the context of pluralism. Interestingly, *Civil Religion* does not use religion as a starting point but local wisdom or human values that are developed. This is in line with the birth of religious moderation that promotes dialogue and positive acceptance of fellow believers of other religions. To be able to achieve the author's final target, a qualitative approach, namely research based on literature will be the method chosen in this paper. Finally, hopefully with the completion of this paper, Bellah's thoughts can be known and continue to be lived.

**Keywords:** *Civil Religion, Moderation of Religion, East Nusa Tenggara*

## PENDAHULUAN

Salah satu kekhasan yang dapat kita jumpai ketika hidup bumi Indonesia ialah kemajemukan. Dari Sabang sampai Merauke pulau-pulau berbanjar dengan keunikannya masing-



masing. Kemajemukan itu juga kita temui dalam kehidupan beragama. Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi yang ada Indonesia juga ternyata terdiri dari ragam suku dan agama.

Keberagaman yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) justru tidak menjadi alasan untuk masyarakat bertikai. Hal ini juga berlaku terhadap harmonisasi kehidupan beragama yang ada di NTT. Salah satu contohnya yaitu bisa dilihat ketika di tahun 2019, tepatnya Minggu, 12 Agustus 2019, umat Kristen (GMIT Kalvari Maumere) berbesar hati untuk menunda jam ibadahnya karena saudara-saudarinya yang beragama Islam sementara menggunakan lahan depan gereja untuk melaksanakan Shalat Idul Adha.<sup>1</sup> Ini hanya satu dari banyaknya potret harmonisasi kehidupan beragama yang rukun di NTT. Masih banyak sekali contoh bagaimana sesama anak-anak NTT, meski berbeda latar belakang tetapi tetap menjadi nilai persaudaraan.

Karena hal ini, maka tidaklah salah jika NTT meraih penghargaan sebagai provinsi yang indeks kerukunan umat beragama sangat baik. Berdasarkan rilis data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 menempatkan Nusa Tenggara Timur di urutan pertama provinsi yang paling rukun. Perolehan nilai yang didapatkan ialah 81,07. Adapun beberapa variabel yang menjadi tolok ukur bagi Kementerian Agama di dalam memberi penilaian terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama di tiap provinsi ialah toleransi, kerja sama, dan kesetaraan.<sup>2</sup>

Penghargaan ini bukan kali pertama NTT diraih oleh NTT melainkan di tahun-tahun sebelumnya pun, NTT juga selalu menempati urutan tiga besar sebagai daerah yang tinggi toleransi hidup beragama. Jika keadaannya begini, maka dapat dipastikan bahwa NTT menjadi rumah yang aman dan tenteram untuk dihuni oleh semua insan yang ada di NTT. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa jangan takut untuk tinggal di NTT sebab budaya penerimaan bagi mereka yang berbeda identitas sangat dijamin. Inilah makna sesungguhnya dari toleransi. Menerima yang berbeda, dan siap menjadikan mereka saudara untuk bersama-sama membangun peradaban di NTT. Anak-anak NTT boleh berbangga dengan hasil yang didapat tetapi sekaligus juga hasil yang didapatkan menjadi suatu ujian apakah ke depan NTT masih bisa merawat kemajemukan beragama atau malah kian merosot.

## **PENJELASAN OBYEK KAJIAN**

Tulisan ini kemudian muncul sebagai suatu bentuk analisis terhadap fenomena kehidupan beragama yang rukun di NTT. Karena itu, di samping tulisan ini menyajikan fakta penghargaan yang diraih oleh NTT sebagai daerah yang tinggi angka toleransi atau kerukunannya, maka tulisan

---

<sup>1</sup> Nansianus Taris and Khairina, "Shalat Id Berlangsung di Depan Gereja, Umat Kristen Tunda Ibadah", *KOMPAS.com* (11 Aug 2019), <https://regional.kompas.com/read/2019/08/11/12480751/shalat-id-berlangsung-di-depan-gereja-umat-kristen-tunda-ibadah>, accessed 02 September 2022 (22:47 WITA).

<sup>2</sup> Dewi Indah Ayu, "Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik", <https://www.kemenag.go.id>, <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic>, accessed 07 September 2022 (20:27 WITA).

ini juga akan secara kreatif memperlihatkan bahwa ternyata ada kearifan hidup bersama yang secara sadar dihidupi oleh masyarakat NTT. Kearifan itu yang mengikat masyarakat NTT sehingga bisa saling menerima dalam kepelbagaian. Tulisan ini juga akan melihat secara positif sumbangsih pikiran Robert Bellah terhadap sikap nasionalisme orang-orang NTT. Orang-orang NTT belum tentu mengenal siapa itu Robert Bellah, apalagi harus diakui bahwa Bellah adalah tokoh yang banyak berkecimpung dengan dunia akademis-teoretis dan hidup di belahan bumi lain tetapi siapa menyangka bahwa pikirannya itu dihidupi oleh masyarakat NTT.

Pendekatan penulisan yang dipakai dalam tulisan ini ialah kualitatif, tetapi sifatnya studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan memiliki beberapa ciri, seperti, *pertama*, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. *Kedua*, data pustaka sifatnya siap dipakai. Maksudnya ialah peneliti tidak pergi kemana-mana selain berhadapan langsung dengan bahan atau sumber yang sudah tersedia untuk dianalisis. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti mendapatkan bahan dari tangan kedua, dan bukan bahan orisinal dari penelitian lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi dalam ruang dan waktu.<sup>3</sup> Karena itu, khusus dalam menganalisis data yang ada, sumber-sumber yang dirujuk merupakan sumber-sumber yang diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan dielaborasi sejauh mana pikirannya Bellah mengenai *Civil Religion* memberi manfaat bagi kerukunan umat beragama di NTT yang ditunjukkan melalui upaya moderasi beragama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Riwayat Hidup dan Konteks Kehidupan Beragama Robert Bellah**

Robert Bellah lahir pada 23 Februari 1927 di Oklahoma Barat Daya, dan berdarah Skotlandia, Presbiterian, namun aslinya berasal dari Irlandia Utara. Ayahnya lahir besar di Texas, dan ibunya adalah seorang berketurunan Inggris dan Skotlandia, yang juga seorang Presbiterian. Dia tumbuh besar dalam suasana kebudayaan Protestan Selatan. Ibunya senang menceritakan kepadanya tentang hari minggu yang tenang, dan dihabiskan dengan pergi ke gereja, membaca Alkitab, pergi ke sekolah minggu. Meski demikian, Robert Bellah menegaskan bahwa Bellah menegaskan bahwa ia tumbuh bukan di dalam atmosfer Injil melainkan di Los Angeles yang bermasyarakat heterogen. Perlu juga diketahui bahwa Robert Bellah besar dalam lingkungan dan masa di mana keadaan dunia porak-poranda karena perang.

Bellah dibentuk pikiran akademisnya di Harvard University hingga memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1956. Setelah menyelesaikan studinya, Bellah mulai mengajar di Almaternya pada 1957 hingga menjadi guru besar pada bidang ilmu sosiologi tahun 1967, lalu kemudian mengabdikan

---

<sup>3</sup> Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2 edition (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), pp. 4-5.

dari 1967-199, lalu di Universitas California Berkeley (1968-1974).<sup>4</sup> Untuk lebih memahami latar belakang dibalik lahirnya pemikiran Bellah, maka dua hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, yaitu konteks hidup beragama di Amerika Serikat dan kondisi antar agama dan lahirnya paham nasionalisme di sana. Kedua hal ini adalah nafas dibalik lahirnya buah pikiran Bellah. Berikut uraiannya:

### **Konteks Hidup Agama di Amerika Serikat**

Di dalam konstitusi Amerika Serikat ditegaskan pemisahan gereja dan negara, dan agama dianggap sebagai persoalan pribadi. Sebenarnya cara berpikir ini mewakili sebuah kerancuan berkelanjutan tentang kata “publik.” Acapkali di Amerika kami membedakan antara sektor publik dan pribadi, yang pertama pemerintah dan yang kedua bukan. Tetapi di dalam dua pengertian ini agama, paling tidak agama Biblikal, di mana keanekaragaman bentuknya membentuk tradisi agama utama di Amerika, tidak bisa menjadi persoalan pribadi. Di sini, dia mengajukan dua alasan: *Pertama*, orang-orang Kristen dan Yahudi mengakui satu Tuhan yang menciptakan surga dan bumi, semua yang terlihat dan tidak, yang kekuasaannya jelas tidak hanya melampaui kehidupan pribadi tetapi bangsa itu sendiri. Tidak ada ranah pribadi atau publik yang tidak menjadi perhatian sebuah tradisi religius semacam ini.

*Kedua*, di dalam satu hal penting, “publik” tidak berarti pemerintahan tetapi sebuah istilah yang bertentangan dengannya. Pada transformasi demokratik abad kedelapan belas, “publik” berarti kewarganegaraan yang mencerminkan perhatian bersama, pembebasan, dan memilih wakil-wakilnya untuk membentuk pemerintahan, yang kekuasaannya dibatasi oleh sebuah konstitusi. Badan-badan keagamaan lebih mencerminkan makna publik ini, bukan karena ditegaskan oleh pemerintah dengan keistimewaan hukum tetapi karena ia memasuki pembahasan bersama tentang kebaikan publik. Di dalam pengertian inilah seseorang sah membicarakan “gereja publik”. Bahkan klausa “tindakan bebas” dari Amandemen Pertama Konstitusi menjamin hak badan-badan keagamaan. Gagasan tentang gereja publik sebenarnya menunjukkan partisipasi dan akses masyarakat yang lebih luas terhadap penafsiran kitab suci dan gereja, yang sebelumnya menjadi monopoli para pendeta.<sup>5</sup>

### **Kondisi antara Agama dan Nasionalisme**

*Pertama*, bagi penganut agama, kesetiaan religius melampaui kesetiaan nasional. Hal ini tidak berarti bahwa kesetiaan ini dengan sendirinya pasti berlawanan; tetapi ketika

---

<sup>4</sup> Ahmad Sahidah, *Agama Sipil Robert N. Bellah – Cantrik* (Yogyakarta: Cantrik, 2019), pp. 73–7.

<sup>5</sup> Ahmad Sahidah, “Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah”, *Simulacra*, vol. 2, no. 1 (2019), p. 8.

keduanya bertentangan, maka klaim agama didahulukan. Keduanya memang pernah berlawanan di Amerika dan ini adalah bukti dari sejarah penolakan dan pembangkangan sipil, tetapi semua komunitas agama besar menerima republik Amerika dan mengutamakan kearifan dari konflik, yang terakhir sebagai sebuah usaha terakhir setelah gagal diperoleh kesaksian dan kompromi. **Kedua**, orang-orang di dalam kongregasi religius yang terorganisir turut serta, di dalam jumlah yang lebih besar dan banyak meluangkan waktu dan uang daripada kelompok-kelompok lain di Amerika Serikat, di dalam komunitas-komunitas yang melampaui keluarga dan lingkaran sahabat formalnya.<sup>6</sup>

### **Konsep *Civil Religion* (Agama Sipil)**

Sebelum Bellah memperkenalkan konsep agama sipil, Rousseau sudah memperkenalkan konsep ini. Agama sipil atau agama madani (Cita-cita terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur) walaupun tidak jelas bentuknya, Rousseau merindukan sebuah agama yang akan memberikan inspirasi kepada rakyat untuk membela negaranya seperti membela agamanya, bagian positif dari agama warga negara. Agama itu mempersatukan rakyat dalam perasaan kebersamaan sosial. Ia tidak mempersoalkan keyakinan masing-masing tentang jalan ke surga; tetapi ia mengajarkan bagaimana hidup bersama dengan sesama warga negara, apa pun agamanya.<sup>7</sup>

*Civil religion* (selanjutnya bisa dibaca Agama Sipil) menurut Robert N. Bellah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Parmudi ditegaskan bahwa *Civil Religion* itu harus dipahami dalam arti sebagai suatu bentuk kepercayaan serta gugusan nilai dan praktik yang memiliki semacam “teologi” dan ritual tertentu yang di dalam realisasinya menunjukkan kemiripan dengan agama. Boleh jadi, agama sipil adalah sebuah sistem atau praktik-praktik yang tidak ada hubungannya dengan agama. Bellah lebih menekankan fungsi agama sipil sebagai *a middle term* yang didukung oleh lembaga agama dan negara sehingga *civil religion* itu menjadi rambu-rambu kehidupan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup>

Di lain pihak, saat membahas *civil religion* Bellah, perlu diseimbangkan dengan bagaimana ia berpandangan tentang agama. Dalam teori agama Bellah sebagaimana yang Haryanto tegaskan, agama dibangun suatu asumsi bahwa masyarakat didasarkan pada pemahaman moral agama. Ia melihat masyarakat sebagai totalitas dan fungsi agama dalam hal ini ialah memberikan makna dan motivasi bagi sistem keseluruhan. Agama merupakan fenomena universal. Ketika sistem simbol agama ditolak maka solusi individual dan kelompok untuk mengatasi problem fundamental seperti orientasi dan identitas diri dapat dilihat sebagai agama. Jadi, ia berposisi bahwa ketidakpercayaan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, pp. 9–10.

<sup>7</sup> Idrus Ruslan, “Membangun Civil Religion Pada Masyarakat Yang Plural; Dilema Pancasila Di Era Reformasi”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 6, no. 2 (2011), p. 7.

<sup>8</sup> Mochamad Parmudi, “Civil religion di Indonesia”, *Jurnal Sosiologi Wali Songo*, vol. 2, no. 1 (2018), p. 52.

merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masyarakat. *Civil religion* kemudian didefinisikan sebagai faktor religius sosial yang berbeda dengan gereja dan negara. Menurut Bellah, *civil religion* terdiri atas seperangkat transenden ideal yang masyarakat dinilai, diintegrasikan, dan dilegitimasi.<sup>9</sup>

Munculnya konsep *Civil Religion* juga tidak bisa dilepaskan dari adanya konsep *civil society* atau masyarakat sipil. Masyarakat sipil kadang disebut sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antar individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri.<sup>10</sup> Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Agama Sipil adalah upaya menangkal adanya konflik dalam ranah agama dan sikap nasionalisme anak bangsa. Lalu, apa itu agama sipil? Secara sederhana, agama sipil dapat diartikan sebagai sikap keberagaman yang dimiliki oleh warga negara, yang sudah ada dan diyakini oleh masyarakat dalam sebuah negara. Agama sipil ada hanya semata-mata untuk meningkatkan rasa cinta seseorang terhadap tanggung jawabnya sebagai warga negara dan penganut agama.<sup>11</sup> Hal yang menarik dari agama sipil ialah konsep Tuhan itu lebih dikaitkan dengan tatanan, hukum, dan hak dibandingkan dengan keselamatan dan cinta.<sup>12</sup>

Agama sipil ini bukan pemujaan terhadap bangsa, sebagaimana dituduhkan oleh para pengkritiknya. Dia mengatakan bahwa tradisi sentral dari di dalam agama sipil Amerika bukan sebagai sebuah bentuk dari penyembahan-diri, tetapi sebagai subordinasi bangsa di bawah prinsip-prinsip etik yang melampauinya dan di dalam pengertian inilah ia seharusnya dinilai. Dimensi religius kehidupan politik Amerika yang menjadi ciri dari republik kita karena dasarnya dan prinsip yang paling sentral adalah bahwa bangsa ini bukan tujuan tertinggi di dalam dirinya, tetapi berpijak pada pertimbangan transenden dan bernilai sejauh ia mewujudkan sebuah hukum tertinggi.<sup>13</sup>

Terakhir, agama sipil dan masyarakat beragama harus dibedakan dengan jelas. Masyarakat beragama dapat diartikan sekumpulan atau sekelompok individu yang mempunyai ikatan norma agama tertentu dan dijadikan pedoman hidup mereka. Masyarakat beragama juga dapat dikategorikan sebagai masyarakat etika religius atau masyarakat teosentris. Masyarakat jenis ini beranggapan, Tuhan sebagai satu-satunya arah dan tujuan akhir hidup (*ultimate goal*) yang ingin diraih.<sup>14</sup> Jelaslah sudah bahwa agama sipil fokusnya lebih kepada bagaimana mencari nilai-nilai

---

<sup>9</sup> Dr. Sindung Haryanto, M.Si., *Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), p. 80.

<sup>10</sup> M. Dawam Raharjo, "Demokrasi, Agama dan masyarakat Madani", *UNISLA*, no. No. 39/XXII/III (1999), p. 27.

<sup>11</sup> Ruslan, "Membangun Civil Religion Pada Masyarakat Yang Plural; Dilema Pancasila Di Era Reformasi", p. 7.

<sup>12</sup> Ahmad Sahidah, *Agama Sipil Robert N. Bellah – Cantrik*, p. 111.

<sup>13</sup> Sahidah, "Agama Sipil di Amerika Serikat", p. 16.

<sup>14</sup> M. Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), p. 52.

kemanusiaan untuk dijiwai dalam konteks kemajemukan, sedangkan masyarakat lebih terarah pada adanya tujuan persaingan antar agama akibat perbedaan paham tentang Tuhan.

### **Konteks Religiositas di Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan rilis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 5,48 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,94 juta jiwa atau 53,61% penduduk NTT beragama Katolik. Sebanyak 1,98 juta jiwa atau 36,8% penduduk NTT beragama Kristen. Kemudian, ada 517,74 ribu jiwa atau 9,44% penduduk NTT yang beragama Islam. Penduduk NTT yang beragama Hindu sebanyak 5,87 ribu jiwa atau 0,11%. Sebanyak 384 jiwa atau 0,01% penduduk di provinsi tersebut beragama Buddha. Sebanyak 32 jiwa penduduk NTT beragama Konghucu. Sementara, ada 35,88 ribu jiwa atau 0,65% penduduk NTT yang menganut aliran kepercayaan.<sup>15</sup>

Selain ke-enam agama yang disebutkan di atas yang ada di NTT, ternyata masih ada juga kepercayaan lokal (penghayat) yang masih ada di wilayah NTT. Sebut saja, kepercayaan Halaik di Boti (Timor Tengah Selatan), Jingitiu (Sabu), dan Marapu (Sumba). Meski perbedaan ini jelas ada, namun yang menarik persinggungan antar kelompok agama sangat minim dijumpai. Dibalik fenomena ini, kita lantas bertanya, apa resep dibalik langgengnya kerukunan di NTT. Untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas, maka Parera dan Marzuki memberi kita beberapa jawaban. Jawaban tersebut sifatnya kontekstual karena ditinjau dari makna filosofi hidup bersama. Berikut adalah resep langgengnya kerukunan di NTT menurut Parera dan Marzuki.

**Pertama**, saling mendukung dan menolong (*Suki Toka Apa*). Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan masyarakat. Manusia membutuhkan hal privasi namun tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Sikap tolong menolong antara umat beragama dapat mewujudkan terciptanya kedamaian umat beragama dalam masyarakat. Sikap saling mendukung dan menolong merupakan kunci untuk menciptakan kehidupan yang rukun. Sikap saling menolong dan mendukung sangat penting bagi warga dalam kehidupan masyarakat yang plural. Nilai-nilai seperti ini dapat tercipta kerukunan antara umat beragama dimasyarakat.

Sikap saling mendukung dan menolong tercipta dalam kehidupan masyarakat melalui beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Misalnya dalam kegiatan pembersihan tempat ibadah tiap-tiap agama seperti gereja dan masjid. Kegiatan ini semua umat beragama bersama-sama terlibat sehingga adanya rasa saling mendukung dan menolong antar sesama umat.

---

<sup>15</sup> Viva Budy Kusnandar, *Mayoritas Penduduk Nusa Tenggara Timur Beragama Katolik pada Juni 2021* | *Databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/mayoritas-penduduk-nusa-tenggara-timur-beragama-katolik-pada-juni-2021>, accessed 07 September 2022.

Kegiatan sederhana seperti ini namun dampaknya sangat besar dengan pembauran antara agama dan interaksi dalam antar sesama umat maupun para tokoh.<sup>16</sup>

**Kedua**, Gotong royong (*Nusi*). Keberagaman beragama di NTT merupakan suatu anugerah yang harus dijaga. Keberagaman dalam agama bukan merupakan suatu ancaman jika dijaga. Keharmonisan tercipta dalam keberagaman ketika antara umat beragama saling bergandeng tangan berjalan bersama dalam kehidupan masyarakat. Kebersamaan di lihat ketika saling bergotong royong dalam kegiatan pembersihan rumah ibadah seperti gereja dan juga rumah ibadah masjid dan semua agama terlibat dalam hal tersebut. Menurut teori Alwasih, sebagaimana yang dijelaskan Parera dan Marzuki, kearifan lokal merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sudah bertahun-tahun lamanya oleh individu atau masyarakat melalui pengalaman dan bertahan hingga saat ini. Kearifan lokal menjadi kekuatan yang dapat menciptakan masyarakat yang kondusif dalam konteks kehidupan dan hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan komunitas. Maka dengan mengangkat dan memahami kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat yang beragam dapat memberikan peran terhadap kehidupan yang rukun, harmoni, saling menghormati dan menghargai antara sesama umat beragama.<sup>17</sup>

**Ketiga**, ikat dan pegang rasa persaudaraan (*Butukila*). Praktik ini dihidupi di Kota Kupang. Kota ini terdiri dari berbagai macam agama, suku dan ras. Maka perlu adanya rasa persaudaraan pada diri warga sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan rukun. Perlu untuk membangun dan memupuk rasa persaudaraan antara sesama umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama agama maka perlunya interaksi baik itu dalam kehidupan maupun dalam kegiatan keagamaan. Dengan mengutip pandangan Purbasari Parera dan Marzuki menjelaskan bahwa interaksi sosial dapat menumbuhkan dan membangun rasa persaudaraan antar sesama dan dapat meminimalisir konflik dan kesenjangan sosial karena adanya sikap keterbukaan antar sesama.<sup>18</sup>

**Keempat**, rasa saling memiliki dan mempunyai (*Muki Nena*). Membangun dan memupuk kebersamaan dalam keberagaman adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kota Kupang terdiri dari berbagai agama, adat istiadat dan suku. Keberagaman suatu bentuk kekayaan yang harus kita rawat. Namun terkadang dalam keberagaman tersebut dapat memicu konflik maupun perpecahan antara masyarakat. Maka dari itu perlu sikap saling memiliki untuk menjalin interaksi dalam perbedaan dimasyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Moh Mul Akbar Eta Parera and Marzuki Marzuki, "Kearifan Lokal Masyarakat dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, vol. 22, no. 1 (2020), p. 42.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 43.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 44.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 45.



Dengan melihat empat kearifan lokal yang telah dengan saksama dijelaskan oleh Parera dan Marzuki, maka satu kesimpulan sederhana yang bisa diambil ialah kearifan lokal memberi sumbangan besar bagi masyarakat NTT, di mana pun daerahnya untuk saling menerima dan saling melengkapi. Kearifan lokal atau nilai-nilai budaya lokal ini dapat disebut sebagai penyumbang besar bagi lahirnya konsep *Civil Religion*. Sekali lagi, karena konsep *Civil Religion* pusatnya bukan pada dipertahankannya dogma agama melainkan mencari jalan tengah bagi terwujudnya masyarakat yang bersatu walau hidup dalam perbedaan. Kearifan lokal adalah salah satu tawaran dari terciptanya *Civil Religion*.

### **Memahami Makna Moderasi Beragama**

Sebelum berangkat lebih jauh memahami makna moderasi, maka ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu dua wajah ganda agama. Maksud dari dipaparkannya kedua hal ini supaya di dalam mengembangkan makna moderasi agama, ada titik berangkat yang jelas. Kedua wajah ganda agama itu, ialah *pertama*, agama telah memajukan peradaban manusia, dengan menghormati kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal, dan mencintai hak-hak asasi manusia, tetapi di sisi lain agama telah menimbulkan perpecahan, konflik, peperangan, dan permusuhan di antara manusia. *Kedua*, agama telah mempersatukan komunitas-komunitas ke dalam kelompok-kelompok, tetapi di sisi lain juga agama mempertinggi perbedaan dari kelompok-kelompok lain bahkan menimbulkan konflik sosial di kalangan masyarakat.<sup>20</sup> Wajah ganda agama yang kedua inilah yang lebih disoroti sebab jika jurang perbedaan itu terus-menerus dibiarkan maka konflik bisa terjadi. Karena itu, moderasi agama muncul belakangan ini sebagai suatu upaya sadar di dalam memperkecil jurang perbedaan agama yang bisa menimbulkan konflik.

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berkelebihan dan tidak kekurangan). Kata ini juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat melebih-lebihkan atau mengurangi). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi memiliki dua makna, yakni: (1). pengurangan kekerasan, dan (2). penghindaran keekstreman. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *moderation*. Kata ini sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.<sup>21</sup>

Berangkat dari pemahaman di atas, maka dapat dikatakan bahwa moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan

---

<sup>20</sup> Syaiful Hamali, "Agama dalam Perspektif Sosiologis", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 12, no. 2 (2017), p. 224.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019), p. 15.

penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, yaitu kutub ultrakonservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.<sup>22</sup>

Moderasi agama menjadi penting untuk didendangkan ketika kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Joni Tapingku memberi tiga alasan mengapa moderasi beragama itu penting. Berikut alasannya, *pertama*, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

*Kedua*, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

*Ketiga*, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 18.

menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai.<sup>23</sup>

### **Sinergitas Umat Beragama di Nusa Tenggara Timur Mengawal Perdamaian**

Kata nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Nationalism*”, yang merupakan perpaduan dari kata “*national*” dan “*ism*”. Nasional adalah kata sifat yang berarti “*of a nation or the nation*” (berkenaan dengan bangsa) dan *nation* itu kata Inggris yang berasal dari bahasa Latin “*natio, natus*” yang berarti “*to be born*” (dilahirkan). *Nation*, artinya menurut bahasa menjadi komunitas besar manusia (bangsa) yang hidup dalam kawasan tertentu dan dinaungi dalam satu pemerintahan. Secara harfiah, istilah nasionalisme ialah paham tentang bangsa atau kebangsaan.<sup>24</sup>

Paham nasionalisme atau saling menerima sebagai anak bangsa tidak perlu lagi diragukan ketika hidup di bumi NTT. Dalam laporannya, Mohammad Ahnaf berpandangan bahwa Kota Kupang yang merupakan ibu kota dari NTT telah dengan sungguh-sungguh menghidupi rasa nasionalisme. Nasionalisme ini yang nampak dalam sikap toleransi. Baginya, toleransi memiliki dua makna, yaitu *pertama*, toleransi bukanlah kondisi yang statis. Kondisi toleransi dan intoleransi perlu ditempatkan dalam spektrum. Sebuah kota bisa mempunyai karakter lebih toleran daripada kota lain, tetapi karena tidak ada kota yang sepenuhnya toleran atau intoleran, posisi dalam spektrum bisa saja berubah seiring dengan perubahan sosial politik, yang berpengaruh terhadap kondisi yang memungkinkan toleransi atau intoleran. *Kedua*, istilah toleransi dan intoleransi sebaiknya tidak dimaknai secara sempit, hanya terkait dengan pandangan teologis keagamaan. Tentu saja keterbukaan teologis bisa berperan penting dalam terwujudnya masyarakat yang toleran. Orientasi teologi yang eksklusif tidak serta-merta menghalangi pemeluk agama, untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Toleransi adalah kondisi multidimensi, yang terkait dengan aspek nilai, sosial dan struktural.<sup>25</sup>

Sekalipun di NTT bisa dikatakan masih tinggi angka toleransi dan semangat nasionalismenya, tetapi Ahnaf memberi peringatan bahwa jangan sampai masyarakat NTT terlena dengan status tersebut, dan akibatnya tidak bisa mengantisipasi kalau ternyata ada bahaya intoleransi yang muncul. Paling tidak, ada beberapa hasil temuan yang dilaporkan oleh Ahnaf

---

<sup>23</sup> Dr. Joni Tapingku, M.Th., “OPINI: Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa”, *LAIN PAREPARE* (15 Sep 2021), <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-moderasi-beragama-sebagai-perekat-dan-pemersatu-bangsa-1079>, accessed 12 September 2022.

<sup>24</sup> Ali Fahrudin, *Nasionalisme Soekarno Dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa* (Jakarta: LITBANGDIKLAT Press, 2020), pp. 29–30.

<sup>25</sup> Mohammad Ahnaf, *Toleransi dan Intoleransi Di Indonesia: Kajian Atas Kultur Toleransi di Tengah Arus Perubahan Sosial Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur*, dalam “*Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia*”, *Laporan Penelitian*. Jakarta: INFID (2016), p. 163.

tentang gejala intoleransi yang tanpa disadari mulai muncul di NTT. Hal ini bisa dilihat melalui adanya beberapa organisasi radikal yang mulai tumbuh di NTT, seperti pada tahun 2015, Brigade Meo menekan aparat untuk melarang aktivitas gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dianggap tidak hanya mengancam situasi damai di Kupang, tetapi juga ideologi negara. HTI adalah gerakan internasional, yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam, bernama khilafah. Oleh karena menentang Pancasila dan demokrasi, HTI mendapatkan tekanan dari masyarakat pada banyak tempat di Indonesia. Di Kupang, massa Brigade Meo secara paksa menurunkan papan nama di kantor HTI. Hal ini diikuti oleh kebijakan pemerintah yang melarang aktivitas publik HTI.<sup>26</sup>

Selain Brigade Meo, di NTT, khususnya Kupang juga muncul HTI. Tetapi, HTI bukanlah satu-satunya kelompok militan Muslim yang aktif di Kupang. Laporan Ketua MUI NTT, sebagaimana yang Ahnaf sampaikan menunjukkan bahwa ternyata kelompok seperti Wahabi, Wahdah Islamiyah, Jemaah Tabligh meskipun kecil mulai menunjukkan eksistensi mereka di Kupang. Sebagian dari mereka kini mulai menguasai masjid dan merubah tradisi ritual yang secara tradisional dilaksanakan oleh Muslim di Kupang. Lalu, ada juga gejala intoleransi antar agama, di kalangan Kristen, yang paling menonjol tercermin dalam polarisasi politik berdasarkan sentimen aliran. Di Kupang ada semacam norma tidak tertulis, bahwa kekuasaan harus dibagi secara berimbang antara kekuatan Katolik dan Kristen.<sup>27</sup>

Adanya gejala intoleransi ini membuka mata masyarakat NTT bahwa sekalipun dijuluki sebagai wilayah yang tinggi toleransinya tetapi ancaman bagi munculnya intoleransi itu ada. Karena itu, masyarakat NTT sudah seharusnya melihat ancaman ini sebagai batu uji guna merawat kembali persaudaraan. Tidak ada yang ingin hidup terus diintai oleh ketakutan, apalagi kekerasan berbau agama.

Karena hal ini, makan Forum Kerukunan Umat Beragama di NTT yang adalah representatif dari kemajemukan beragama di NTT melakukan beberapa terobosan atau langkah-langkah nyata di dalam merawat kerukunan. Langkah-langkah itu seperti, mendorong para tokoh agama agar selalu melakukan diskusi secara intern dan ekstern mengenai kerukunan agar umat tidak hanya melihat program tapi juga mendengarkan diskusi dari para tokoh agama guna meningkatkan toleransi umat beragama. FKUB juga selalu membangun komunikasi dengan pemerintah baik melalui komunikasi pribadi, komunikasi publik maupun kelompok agar memberikan dukungan dana yang maksimal sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006. Kemudian memaksimalkan setiap dana yang diberikan pemerintah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 176.

<sup>27</sup> *Ibid.*, pp. 178 & 180.

dengan melihat program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat guna memaksimalkan toleransi umat beragama. Ada juga membuat proposal kepada Pemerintah dengan berbagai penjelasan bahwa setiap program yang diberikan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan toleransi. Serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan yang ada dan membangun pemahaman masyarakat melalui sosialisasi akan pentingnya FKUB dalam membangun kualitas kerukunan yang tinggi sebagai contoh bagi provinsi ataupun kab/kota lain di Indonesia.<sup>28</sup>

### **Sumbangan Pemikiran Robert Bellah terhadap Upaya Merawat Kerukunan di Nusa Tenggara Timur**

Konteks Amerika yang majemuk dan demokratis juga keadaannya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kemajemukan pada satu pihak adalah anugerah, tetapi pada pihak lain memiliki potensi untuk menciptakan konflik sosial. Karena itu, untuk merawat Indonesia yang majemuk, dan menghindari perpecahan diperlukan sebuah jalan alternatif untuk melerai konflik. Salah satu alternatif melerai konflik ialah dengan melihat Pancasila sebagai agama sipilnya bangsa Indonesia. Hal menarik bahwa di dalam Pancasila, identitas kebangsaan dan identitas keagamaan tidak ada dalam posisi yang berbenturan. Pancasila justru mensinergikan dua identitas tersebut. Karena Pancasila itu merupakan sinergi kreatif antara identitas kebangsaan dan identitas keagamaan maka agama-agama yang ada di Indonesia berkesempatan menyumbangkan nilai-nilai etika dan moral yang memperkuat solidaritas nasional anak bangsa.<sup>29</sup>

Dengan kata lain, agama sipil adalah suatu panggilan bagi masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya untuk menjawab panggilan merawat nilai-nilai ke-Indonesia-an. Agama sipil adalah upaya sadar membangkitkan nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah nilai kemanusiaan, bukan khas agama tertentu.<sup>30</sup> Dengan memahami hal ini, maka semua anak bangsa dipanggil untuk merawat persatuan.

Bagi Takdir, kerukunan sesungguhnya mengandung pengertian dinamis. Maksudnya ialah pengakuan bahwa kendati masing-masing individu berbeda, tetapi tidak lantas harus bermusuhan dan bertikai satu sama lain. Memang juga ada sejenis kerukunan yang biasa disebut kerukunan semu (artifisial). Dalam kerukunan seperti itu, sekelompok orang yang tinggal dalam lingkungan yang sama, namun sama sekali tidak bersentuhan dan berinteraksi sebagai makhluk sosial. Situasi

---

<sup>28</sup> Nimrod Frebdes Taopan, Petrus Ly, and Leonard Lobo, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Kupang", *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kevarnagaraan)*, vol. 1, no. 1 (2020), p. 6.

<sup>29</sup> Masroer Ch. Jb, "Agama dan Nasionalisme: Ketegangan yang Harus Dipersatukan", dalam "Nyantri bersama John Titaley: menakar teks, menilai sejarah, dan membangun kemanusiaan bersama: buku penghormatan ulang tahun ke-64 Profesor John Adrianus Titaley, Th.D", ed. by Steve Gaspersz (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2014), p. 409.

<sup>30</sup> Franz Magnis-Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), pp. 160–1.

atau kondisi seperti itu tidak bisa disebut dengan kerukunan, karena tidak mencerminkan kebersamaan dalam keberagaman. Kerukunan seperti itu adalah jenis pelarian ketika orang tidak lagi mampu berhadapan dengan dunia yang riil.<sup>31</sup>

Lanjutnya, kerukunan autentik adalah ketika masing-masing individu berani melampaui bata-batas primordial, mengambil prakarsa secara cepat, dan tidak pernah mengedepankan prasangka dalam menjalin kehidupan sosial di masyarakat. Para tokoh agama memang memegang peranan kunci untuk mendorong kerukunan umat beragama, tapi tidak dapat bekerja sendirian atau sekadar bertindak sebagai pemadam kebakaran. Dengan mengutip pandangan Yewangoe, Takdir lantas mempertegas kalau kemajemukan itu bukan dicari-cari atau direkayasa, tapi sesuatu yang *given* dari Tuhan. Maka setiap individu harus menyikapi kemajemukan itu dengan penuh kearifan, bukan malah merusak atau membunuh satu sama lain. Bagaimana mungkin situasi kerukunan bisa di bawa ke arah praksis (tindakan), kalau satu sama lain tidak bisa saling menghargai segala perbedaan yang ada.

Kerukunan berarti merasakan harmoni dan tiadanya permusuhan antar sesama yang menggambarkan hubungan antara kelompok yang berbeda karakter dengan tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati, keadilan, dan kehendak baik. Secara umum, kerukunan digambarkan dengan kehangatan, ketenangan, dan kesunyian tanpa kegaduhan dan perselisihan yang mengganggu keharmonisan hidup.<sup>32</sup>

*Civil religion* dan nasionalisme sesungguhnya adalah suatu bentuk pengamalan terhadap sila kedua dari Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan mengutip pandangan dari Darmodiharjo, Ruslan berkomentar bahwa, "Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulit, jadi bersifat universal. Mereka sama-sama memiliki martabat yang tinggi, karena itu harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia. Dengan konsep tersebut, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama di hadapan undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama; setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan

---

<sup>31</sup> Mohammad Takdir, "Model-Model Kerukunan Umat Beragama berbasis Local Wisdom", *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, vol. 1, no. 01 (2017), pp. 64–5.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 65.

Tuhan, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia".<sup>33</sup>

Bellah, memang tidak dikenal secara luas atau begitu tenar di NTT. Tetapi, kontribusi pemikiran Bellah mengenai *civil religion* benar-benar dihayati atau dihidupi oleh masyarakat NTT. Masyarakat NTT, terlepas dari adanya perbedaan suku, agama, ras, dan lain-lain tetapi memandang bahwa ikat persaudaraan atas nama kemanusiaan menjadi harga mati yang harus tetap dijaga. Tingginya angka toleransi menandakan bahwa masyarakat NTT yang adalah juga umat beragama telah maju dalam berpikirkannya sehingga jurang-jurang pemisah oleh karena perbedaan latar belakang tidak lagi dilihat sebagai alat untuk menyerang. Konsep *civil religion* yang Bellah kemukakan juga belakangan mulai dihidupi ketika wacana moderasi beragama mulai dikumandangkan. Moderasi beragama ada juga untuk membuka ruang dialog antar agama dan kemudian menghasilkan keputusan bersama untuk tetap mengawal perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Sekali lagi, *civil religion* hanya akan mendapatkan maknanya apabila suatu tempat dihuni oleh orang-orang yang memiliki banyak perbedaan keyakinan.

## **KESIMPULAN**

Akhir-akhir ini di Indonesia kita banyak disuguhkan oleh berita-berita baik di media masa, elektronik atau juga di media sosial tentang munculnya banyak kelompok-kelompok radikal yang memberi banyak peluang bagi terciptanya intoleransi. Kita tentu mengutuk segala macam aksi kekerasan seperti ini. Saat bising intoleransi makin menyeruak, kabar baik datang dari Timur, Indonesia, yaitu NTT. Wilayah ini selalu mendapatkan penghargaan sebagai wilayah yang tinggi toleransinya sehingga ada yang berpendapat bahwa NTT itu adalah akronim dari Nusa Tinggi Toleransi. Penghargaan ini hendak mempertegas kalau NTT bisa menjadi rumah besar untuk ditempati oleh para penghuni yang datang dari ragam latar belakang kehidupan, termasuk agama. Umat beragama telah sadar tentang pentingnya hidup dalam rasa saling menerima satu sama lain. Pada pihak yang lain, nilai-nilai kearifan lokal masih tetap dipegang sebagai falsafah hidup sehingga walau banyak berbeda latar belakang tetapi masyarakatnya masih memiliki hati yang besar untuk hidup karib. Falsafah hidup yang dipegang oleh manusia-manusia NTT ini yang kemudian menciptakan iklim bagi hadirnya agama sipil/*civil religion*. Sekali lagi, konsep agama sipil tidak akan menyentuh ranah dogma masing-masing agama, melainkan mencari jalan tengah bagi terawatnya nilai-nilai persaudaraan, dan cinta kasih. *Civil religion* pada akhirnya juga membuka peluang bagi terselenggaranya moderasi beragama yang baik di NTT. Pada akhirnya NTT hanya akan tetap

---

<sup>33</sup> Idrus Ruslan, *NEGARA MADANI: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Yogyakarta: SUKA-Press, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), p. 198.

toleran bagi semua manusia yang ada di dalamnya apabila semua menyadari untuk tetap merawat persatuan dan kerukunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Indah Ayu, “Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik”, <https://www.kemenag.go.id>, <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic>, accessed 07 September 2022 (20.27 WITA).
- Dr. Joni Tapingku, M.Th., “OPINI: Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa”, *LAIN PAREPARE*, 15 Sep 2021, <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-moderasi-beragama-sebagai-perekat-dan-pemersatu-bangsa-1079>, accessed 12 September 2022.
- Dr. Sindung Haryanto, M.Si., *Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Fahrudin, Ali, *Nasionalisme Soekarno Dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa*, Jakarta: LITBANGDIKLAT Press, 2020.
- Hamali, Syaiful, “Agama dalam Perspektif Sosiologis”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 12, no. 2, 2017, pp. 223–44 [<https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2111>].
- Infid, Tim Peneliti, “Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia, Pembelajaran dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro, dan Kupang”, *Laporan Penelitian. Jakarta: Infid*, 2016.
- Magnis-Suseno, Franz, *Mencari Makna Kebangsaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Masroer Ch. Jb, *Nyantri bersama John Titaley: menakar teks, menilai sejarah, dan membangun kemanusiaan bersama: buku penghormatan ulang tahun ke-64 Profesor John Adrianus Titaley, Th.D*, ed. by Steve Gaspersz, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2014.
- Mochamad Parmudi, “Civil religion di Indonesia”, *Jurnal Sosiologi Wali Songo*, vol. 2, no. 1, 2018, pp. 1–129.
- Nansianus Taris and Khairina, “Shalat Id Berlangsung di Depan Gereja, Umat Kristen Tunda Ibadah”, *KOMPAS.com*, 11 Aug 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/11/12480751/shalat-id-berlangsung-di-depan-gereja-umat-kristen-tunda-ibadah>, accessed 02 September (22.47 WITA).
- Parera, Moh Mul Akbar Eta and Marzuki Marzuki, “Kearifan Lokal Masyarakat dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, vol. 22, no. 1, 2020, pp. 38–47 [<https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p38-47.2020>].
- Raharjo, M. Dawam, “Demokrasi, Agama dan masyarakat Madani”, *Unisia*, no. No. 39/XXII/III, 1999, pp. 25–33 [<https://doi.org/10.20885/unisia.v0i39.5736>].
- Ruslan, Idrus, “MEMBANGUN CIVIL RELIGION PADA MASYARAKAT YANG PLURAL; DILEMA PANCASILA DI ERA REFORMASI”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 6, no. 2, 2011, pp. 1–28 [<https://doi.org/10.24042/ajsla.v6i2.494>].
- , *NEGARA MADANI: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 1st edition, Yogyakarta: SUKA-Press, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Sahidah, Ahmad, *Agama Sipil Robert N. Bellah – Cantrik*, Yogyakarta: Cantrik, 2019.
- , “Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah”, *Simulacra*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 5–20 [<https://doi.org/10.21107/sml.v2i1.5517>].
- Takdir, Mohammad, “Model-Model Kerukunan Umat Beragama berbasis Local Wisdom”, *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, vol. 1, no. 01, 2017, pp. 61–83 [<https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.728>].
- Taopan, Nimrod Frebdes, Petrus Ly, and Leonard Lobo, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama di



- Kota Kupang”, *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 1–9.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama*, Cetakan pertama edition, ed. by Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019.
- Viva Budy Kusnandar, *Mayoritas Penduduk Nusa Tenggara Timur Beragama Katolik pada Juni 2021 | Databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/mayoritas-penduduk-nusa-tenggara-timur-beragama-katolik-pada-juni-2021>, accessed 07 September 2022.
- Wibisono, M. Yusuf, *Sosiologi Agama*, Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Zed, Mestika, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2 edition, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.